



Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota



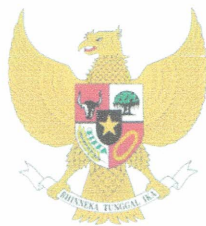
RENCANA KERJA TAHUN 2026



DINAS
PERHUBUNGAN



Jalan Mr. Syarifuddin Prawira Negara KM 07 Tanjung
Pati Telp.(0752) 7754203 Fax (0752)7750136
E-mail : dishub50kota@gmail.com
Website : <http://dishub.limapuluhkotakab.go.id/>



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Renja PD disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 - f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR.....41.....

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2026, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun berjalan serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional.

Rencana Kerja selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tercapai proses perencanaan pembangunan transportasi yang baik.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat dihargai sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan semoga yang telah direncanakan ini dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tanjung Pati, September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



M. DARMAWIJAYA, SH

Penyaha Utama Muda (IV/c)

NIP.19690606 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Landasan Hukum	I-8
I.3 Maksud dan Tujuan	I-10
I.4 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	II-1
2.1	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-46
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-75
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	III-1
3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2026	I-3
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan s/d Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-5
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-33
Tabel II.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-51
Tabel II.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-75
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-3
Tabel III.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2026	III-4
Tabel III.3	Tabel Pendukung Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-8
Tabel III.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	III-9
Tabel IV.1	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026	IV-1
Tabel IV.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen organisasi dan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan. Pada tingkatan Perangkat Daerah, implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana Kerja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena mencakup perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih tinggi seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat penggunaannya.

Dalam prosesnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala

Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan yang penyusunannya melibatkan aparatur Dinas Perhubungan guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RKPD. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah seluruhnya dipedomani dari RKPD, agar target kinerja Daerah tercapai melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 nantinya sebagai tindak lanjut untuk penentuan KUA-PPAS dan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang maupun Staf. Berpedoman pada pasal 128 Pemendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berikut adalah tabel penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																												
C	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																												
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pikir serta hasil Musrenbang																																												
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																												
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																												
D	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD																																												

- I. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pada awal bulan Desember 2024, telah mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan oleh penyusun hingga batas waktu penyampaian pada tanggal 21 Februari 2025. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Dishub tahun 2025-2029, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja Dinas Perhubungan dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan dimulai proses penyusunannya pada minggu ke-4 Februari 2025.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum Perangkat Daerah/Lintas Dinas Perhubungan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan seperti beberapa OPD yang Berkaitan, Pihak Kepolisian, TNI, dan Kecamatan. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja PD. Hasil pelaksanaan

Forum Perangkat Daerah/Lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas PD. Forum Dinas Perhubungan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 di Ruang Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan yang dihadiri oleh Perangkat

Daerah Yang Berkaitan dan pemangku kepentingan lainnya yang dihadiri secara daring (online).

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan dimulai pada bulan Juli 2025 dan diserahkan kepada Bappelitbangda untuk diverifikasi.

VI. Penetapan Renja PD

Rancangan akhir Renja PD yang telah disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda diverifikasi untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Perkada tentang RKPD dan Renja PD lainnya. Apabila dalam hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan kemudian menyempurnakan rancangan akhir Renja PD tersebut sesuai hasil Verifikasi dari Bappelitbangda dan disampaikan kembali oleh Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda.

Setelah seluruh tahapan proses penyusunan Renja dilaksanakan, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Bappelitbangda disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undamng-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Undonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya.
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 – 2043 ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 16) ;
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Prangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18)

Selain dari Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Perubahan Renja 2026 ini juga mempertimbangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Perencanaan Nomenklatur Pembangunan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Perhubungan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Perhubungan.
3. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Perhubungan.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan
- BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027
- BAB V PENUTUP
Berisi uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Rencana Kerja untuk Tahun berjalan yaitu Tahun 2025 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Persentase penggunaan anggaran tahun 2024 dari pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.825.509.591 terealisasi sebesar Rp 13.247.464.451 atau 95.82%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp 578.045.140 atau 4.18%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian realisasi Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan;
Pada tahun 2024 terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan.
Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 - A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - B. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2024 kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

- A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- B. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- E. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - ✓ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- F. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✓ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- G. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota
 - ✓ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - ✓ Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- H. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - ✓ Pelaksanaan , Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - ✓ Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi,

Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor

I. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

- ✓ Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
kewenangan Kabupaten / Kota

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada tahun 2024 satu kegiatan yang telah melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan antara lain :

A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- ✓ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan
Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh
Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, dengan artian
semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik terealisasi pada
masing-masing kegiatan.

Dalam pelaksanaannya terdapat dua kegiatan yang tidak
dapat mencapai target kinerja yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Penyediaan
Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan target
yaitu pengadaan dan pemasangan 2 Unit Rambu Tiang
Tunggal dan 5 Unit RPPJ. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Harga di DPA lebih rendah dibandingkan di e-catalog versi
5
- Dilakukan perubahan harga DPA sesuai dengan harga di
e-katalog versi 5
- Setelah harga di DPA disesuaikan, penyedia barang di e-
katalog versi 5 sudah hilang atau dihapus dan tidak
masuk di e-katalog versi 6 sementara waktu efektif yang
tersedia 20 hari kerja, jadi dirasa tidak cukup waktu
melakukan pengadaan secara langsung

2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota sub kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota, tidak tercapainya
target kinerja sub kegiatan ini terjadi akibat:

- Tidak adanya permintaan pemanduan Bupati
- Kendaraan pemanduan (operasional) sering mengalami
kerusakan
- Masa kontestasi politik / pemilihan kepala daerah

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan masyarakat pada umumnya
 - b) Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah berdampak pada laporan target kinerja dan laporan realisasi keuangan perangkat daerah,
 - c) Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
 - d) Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a) Untuk keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan pengusulan anggaran ke pemerintah agar mendapatkan dana tambahan ke daftar anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota,
 - b) Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai,
 - c) Kerjasama yang baik dari berbagai pihak internal maupun eksternal Perangkat Daerah sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target dan sasaran sehingga meminimalisir ketidaksesuaian antara berbagai pihak,
 - d) Dilakukan peningkatan kinerja agar tercapainya target kegiatan pada tahun yang akan datang.
 - e) Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan melakukan pelatihan/diklat/pendidikan agar terampil dalam melaksanakan tugas demi lancarnya program yang telah direncanakan,

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2024 maka Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan sampai dengan 2024 disajikan pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan s/d Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 1 5 0 1 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 1 5 0 1 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 01 0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 01 0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 0 2 01 0004	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 0 2 01 0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 0 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30	10	0	0	0	0	10	33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 1 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	6	0	0	0	0	6	27%
2 1 5 0 1 2 02	Administrasi Keuangan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 1 5 0 1 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	242	147	58	58	100%	77	282	117%
2 1 5 0 1 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	24	12	12	100%	1	37	51%
2 1 5 0 1 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	0	0	0	0	2	33%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 1 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	80	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 1 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 1 5 1 2 03 0001	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 1 2 03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 1 2 03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 1 2 03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 04	Admnitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 1 5 1 2 04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	20	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 1 2 04 0002	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	20	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 1 2 04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	20	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 1 2 04 0005	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	60	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 1 2 04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 1 5 0 1 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 05 0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	25	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 1 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	19	4	4	100%	4	27	75%
2 1 5 0 1 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	30	4	4	100%	4	38	224%
2 1 5 0 1 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160	57	4	4	100%	4	65	41%
2 1 5 0 1 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	482.914	36	12	12	100%	12	60	0%
2 1 5 0 1 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6379	16	0	0	0	0	16	0%
2 1 5 0 1 2 06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3174	36	12	12	100%	12	60	2%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 1 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	36	12	12	100%	12	60	42%
2 1 5 0 1 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2 1 5 0 1 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 1 2 07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	151	0	0	0	0	9	9	6%
2 1 5 0 1 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109	3	0	0	0	0	3	3%
2 1 5 0 1 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 1 5 0 1 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.917	25	4	4	100%	4	33	1%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 1 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	23.379.032	36	12	12	100%	12	60	0%
2 1 5 0 1 2 08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	18	12	12	100%	4	34	189%
2 1 5 0 1 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	24	12	12	100%	6	42	39%
2 1 5 0 1 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	26	19	19	100%	19	64	97%
2 1 0 2 09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	1	2	2	100%	0	3	60%
2 1 0 2 09 0010	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 0 5 2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2,42	2,38	2,82	1,64	58%	2,68	2,68	111%
2 1 0 5 2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,50	0,23	0,52	0,42	81%	0,51	0,51	102%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Angkutan Jalan (LLAJ)									
2	1 5 0 2 2 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2	1 5 0 2 2 01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2	1	0	0	0	0	1	50%
2	1 5 0 2 2 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	75%	101%	60%	60%	100%	70%	70%	93%
2	1 5 0 2 2 02 0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	1 5 0 2 2 02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	101.229	162	9	2	22%	0	164	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 2 2 02 0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3.396	205	100	410	410%	500	1.115	33%
2 1 5 0 2 2 03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2 1 5 0 2 2 03 0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1	1	0	0	0	0	1	100%
2 1 5 0 2 2 03 0002	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 03 0003	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 03 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang	30	2	0	0	0	0	2	7%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
		Utama dan Pendukung)	Direhabilitasi dan Dipelihara									
2	1 5 0 2 2	03 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	0	0	0	0	0%		
2	1 5 0 2 2	04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	1 5 0 2 2	04 0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	2	1	1	100%	8	11	1100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 2 2 04 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6	0	0	0	0	6	0%
2 1 5 0 2 2 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	99%	93%	95,25%	102%	94,5%	94,5%	99%
2 1 5 0 2 2 05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	1	0	0	0	8	9	450%
2 1 5 0 2 2 05 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	0	2	0	0%	1	1	3%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 2 2 05 0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	150	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52.932	9.380	3.000	3.000	100%	0	12.380	23%
2 1 5 0 2 2 05 0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.300	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 05 0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	119	27	9	9	100%	9	45	38%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Kendaraan Bermotor									
2	1 5 0 2	2 05 0008	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15	3	0	0	0	3	20%
2	1 5 0 2	2 05 0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	15	0	0	0	0	0	0%
2	1 5 0 2	2 05 0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	0	0%
2	1 5 0 2	2 06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 2 2 06 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	1	1	1	100%	1	3	0%
2 1 5 0 2 2 06 0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 06 0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	2	0	0	0	0	2	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 2 2 06 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.321	253	12	12	100%	0	265	20%
2 1 5 0 2 2 06 0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	61	1	0	0	0	0	1	2%
2 1 5 0 2 2 07 0000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2 1 5 0 2 2 07 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 07 0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 5 0 2 2 07 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	58	1	0	0	0	0	1	2%
2 1 5 0 2 2 07 0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	58	1	0	0	0	0	1	2%
2 1 5 0 2 2 08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 1 5 0 2 2 08 0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	0	0	0	0	0	0	0%
2 1 5 0 2 2 08 0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	58	0	3	3	100%	0	3	5%
2 1 5 0 2 2 08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	38	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 2 08 0004	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	170	0	0	0	0	3	3	2%
2 1 0 2 2 08 0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	70	1	0	0	0	0	1	1%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 2 08 0009	Pelaksanaan Pengawasan melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	2	2	100%	2	4	0%
2 1 0 2 2 09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 09 0001	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	75	15	0	0	0	0	15	20%
2 1 0 2 10	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2 1 0 2 10 0001	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kewenangan kabupaten/Kota								
2	1 5 0 2 2 10 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	230	0	0	0	0	0	0%
2	1 5 0 2 2 11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	1 5 0 2 2 11 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 2 12	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2 1 0 2 2 12 0001	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	6	0	0	0	0	6	24%
2 1 0 2 2 12 0002	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencanan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.200	0	0	0	0	0	0	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 2 14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 1 0 2 2 14 0001	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	2	0	0	0	0	2	200%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 2 14 0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	3	1	1	100%	1	5	500%
2 1 0 2 2 16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2 1 0 2 16 0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	1	0	0	0	0	1	50%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 19 tahun 2024.

Untuk kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah belum mempunyai legalitas yang mendukung atau belum diaturnya petunjuk pelaksana atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang urusan Perhubungan. Belum adanya standar tentang layanan transportasi yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, maka dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024-2025 masih berpedoman pada target yang terdapat di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Namun untuk target kinerja tahun 2026-2027 telah berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tabel kajian terhadap capaian kinerja pada halaman selanjutnya.

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Rasio Konektivitas	-	IKK	-	IKU PD	48	49	50	51	70	Tidak Tersedia	50	51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2025 tidak tersedia atau Not Available ➤ Target pada tahun 2021-2025 merupakan Indikator Kinerja kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 ➤ Target 2025-2029 menjadi indikator Kinerja Utama (IKU Dishub) Sesuai dengan Inmendagri no 2 Tahun 2025 ➤ Untuk Realisasi Tahun 2024 Tercapai

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Konektivitas Darat	-	IKK	-			10	11	12	-	Tidak Tersedia	11	12	➤ Target 2025-2029 menjadi indikator Kinerja Kunci (IKK Dishub) Sesuai dengan Inmendagri no 2 Tahun 2025
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	-	IKK	-	-		55	53	50	-	Tidak Tersedia	53	50	➤ Target 2025-2029 menjadi indikator Kinerja Kunci (IKK Dishub) Sesuai dengan Inmen no 2 Tahun 2025

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	-	IKU KD	IKU PD	0,51	0,51	-	-	0.34	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target pada tahun 2021-2025 merupakan IKU KD dan IKU PD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (Not Applicable) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan	-	-		IKU PD	2,68	2,55	-	-	1.39	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Target pada tahun 2021-2025 merupakan IKU PD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (<i>Not Applicable</i>) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029 ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 tidak tersedia atau (<i>Not Available</i>)
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	-	-		IKU PD	79,59	79,60	76,6	76,61	76,69	Tidak Tersedia	76,6	76,61	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Perlu Ditingkatkan ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (<i>Not Available</i>) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Persentase penurunan Angka Kecelakaan (%)	-	-		-	3%	4%	-	-	5.5%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
8	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik (%)	-	-	-	-	70%	72%	-	-	22%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Perlu Ditingkatkan ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (Not Applicable) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	-	-	-	-	94,5	94,75	-	-	99.87%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
10	Aspek penyebab kemacetan yang teratasi	-	-	-	-	64	66	-	-	33	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (Not Applicable) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan (%)	-	-	-	-	98,00	98,20	-	-	95,82	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Perlu Ditingkatkan ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
12	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	86	87	-	-	N/A	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 tidak tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (Not Applicable) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
13	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	-	-	-	4.400.000	4.500.000	-	-	0	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tidak Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
14	Rasio ijin trayek	-	-	-	-	2,96	2,97	-	-	3.53	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
15	Jumlah uji KIR angkutan umum	-	-	-	-	6162	6237	-	-	7147	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
16	Jumlah Pelabuhan Terminal Penumpang dan Terminal Barang	-	-	-	-	4	4	-	-	0	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tidak Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (<i>Not Available</i>) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
17	Persentase layanan angkutan darat	-	-	-	-	0,01%	0,01%	-	-	0.01%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (<i>Not Available</i>) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (<i>Not Applicable</i>) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
18	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	-	-	-	-	93%	93%	-	-	99.25%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
19	Pemasangan Rambu-rambu	-	-	-	-	62%	63%	-	-	0%	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tidak Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (Not Applicable) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029
20	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	-	0,0155	0,0155	-	-	0,0155	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (Not Available)

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029
21	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	-	-	-	4.400.000	4.500.000	-	-	0	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tidak Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (<i>Not Available</i>) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (<i>Not Applicable</i>) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029
22	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	-	-	-	140.000	145.000	-	-	0	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tidak Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (<i>Not Available</i>) ➤ Target 2026-2027 berdasarkan Renstra Dishub Tahun 2025-2029

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
23	Rasio Konektivitas Kota	-	-	-	-	48	49	-	-	70	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Data Tahun 2025 Tidak Tersedia (<i>Not Available</i>) ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (<i>Not Applicable</i>) karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029
24	V/C Ratio di jalan Kota	IKK	-	-	-	0,51	0,51	-	-	0.34	Tidak Tersedia	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data Tahun 2024 Tercapai ➤ Target pada tahun 2021-2025 merupakan Indikator Kinerja kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 ➤ Target 2026-2027 Tidak Berlaku lagi (<i>Not Applicable</i>)

No	Indikator	SPP / Standar Nasional	IKK/ IKD	IKU KD	IKU KEPALA PD (Dinas Perhubungan)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														karena tidak tersedia pada Renstra Dishub Tahun 2025-2029

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Tabel II.2 diatas menginterpretasikan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2024. Secara umum indikator-indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 telah tercapai.

Kinerja pelayanan yang telah mencapai target pada tahun 2024 diantaranya :

1. Indeks kelancaran lalu lintas
2. Rasio Fatalitas kecelakaan per 10.000 kendaraan
3. Persentase penurunan angka kecelakaan
4. Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan
5. Aspek Penyebab Kemacetan yang teratasi
6. Rasio ijin trayek
7. Jumlah uji kir angkutan umum
8. Persentase layanan angkutan darat
9. Persentase kepemilikan Kir angkutan umum
10. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
11. Rasio konektifitas kota
12. V/V Rasio di jalan kota

Sedangkan kinerja pelayanan yang belum tercapai target pada tahun 2024 diantaranya:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
2. Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten yang berfungsi baik
3. Persentase Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan
4. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)
5. Jumlah arus penumpang angkutan umum
6. Jumlah pelabuhan terminal penumpang dan terminal barang
7. Pemasangan rambu-rambu
8. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
9. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya kinerja pelayanan adalah adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan sehingga kegiatan dapat mencapai angka/nilai yang telah ditargetkan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada tahun 2024 adalah adanya pergeseran anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan prioritas sesuai dengan kebijakan sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah kedepan sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan daerah.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan adalah meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas untuk mencapai pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas dengan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah pada saat jam sibuk.
- b. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dengan Penyediaan perasarana dan perlengkapan jalan diantaranya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pengadaan rambu, Pengadaan Marka dan lainnya
- c. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Lalu Lintas dengan Sosialisasi tata cara berlalu lintas bagi pengguna jalan hal ini dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan sehingga terwujudnya kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melaksanakan wewenang di Bidang Perhubungan dengan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari:

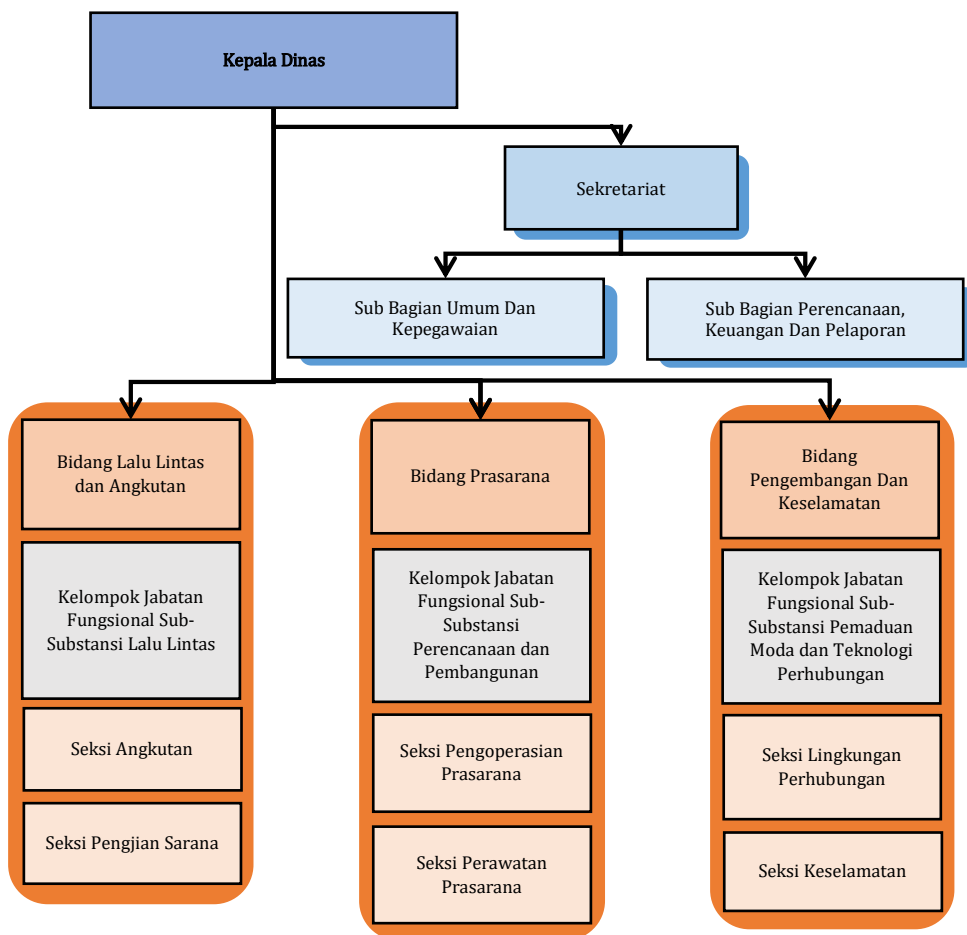
- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Pengujian Sarana.
- d) Bidang Prasarana, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana;

3. Seksi Perawatan Prasarana.

- e) Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Keselamatan;
 - 2. Seksi Pemanduan Moda Dan Teknologi Perhubungan;
 - 3. Seksi Keselamatan.
- f) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk mengetahui Lebih jelas tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada struktur dibawah ini :

**Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota**



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

1. Belum adanya Terminal Tipe C di kawasan IKK Sarilamak.
2. Kurangnya tingkat keselamatan sekolah dikawasan IKK Sarilamak sehingga diperlukannya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
3. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan

4. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas
5. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan
6. Belum adanya kebijakan pemerintah dalam mengalihkan penetapan status jalan Nasional sehingga menyebabkan Kawasan Perkotaan (IKK) Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum tertata dan terkelola dengan baik
7. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
8. Belum memadainya angkutan umum yang melayani daerah-daerah terisolir pada wilayah Kabupaten.
9. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang perhubungan masih terbatas
10. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan;
11. Tidak meratanya beban kerja;
12. Lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian;
13. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi;

Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menjadi salah satu penunjang kesuksesan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu pada misi 4 yaitu “*Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan*”, dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Pelayanan transportasi yang belum optimal, terpadu dan terintegrasi
2. Pelaksanaan sistem dan mekanisme transportasi yang belum efektif dan efisien

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan memperlihatkan tantangan dan peluang sebagai berikut:

1. Tantangan
 - a. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
 - b. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas;
 - c. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal
2. Peluang
 - a. Letak geografis yang strategis;
 - b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah;
 - c. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 - d. Adanya potensi hubungan mutualisme dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan *Stake holder* lainnya.

Dalam menyikapi isu-isu penting, rekomendasi dan catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan diantaranya

sebagai berikut :

1. Merencanakan Pembangunan Terminal Tipe C di kawasan IKK Sarilamak
2. Merencanakan Zona Selamat Sekolah di kawasan IKK Sarilamak
3. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
4. Mengoptimalkan penyusunan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintah
5. Membangun sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
6. Melakukan pendataan dan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas dan parkir
8. Memiliki data yang *valid* dan *up to date*

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD.

Pada akhirnya, Rencana Kerja Dinas Perhubungan juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Disebabkan karena Rancangan Awal RKPD kadang tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil Review Rancangan Awal RKPD diperoleh temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD merupakan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan ideal dilapangan, sedangkan hasil analisis merupakan rancangan setelah adanya pembagian anggaran atau sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Adanya keterbatasan anggaran sehingga dilakukannya penyesuaian belanja pada masing-masing sub kegiatan mengikuti kondisi keuangan daerah.
3. Adanya perubahan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Kode dan Nomenklatur Urusan.
4. Pada rancangan awal RKPD terdapat 2 Program, 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sedangkan pada Hasil Analisis

Kebutuhan terdapat 2 Program, 12 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan.

5. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak ada setelah hasil analisis kebutuhan yaitu :
 - a. Kegiatan Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu);
 - b. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

6. Terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang tidak ada setelah hasil analisis kebutuhan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berikut adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditampilkan dalam Tabel II.3:

Tabel II. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				15.986.291.293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				16.527.684.489	
2	15	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.240.291.293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	15.647.720.989	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	0%	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	0%	-	
2	15	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	-
2	15	01	2	01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	-
2	15	01	2	01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-
2	1	0	2	0		Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	5.358.291.293	Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi keuangan	100%	5.811.247.832	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	1	0	2	0	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	46	5.342.291.293	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	5.788.072.232	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	16.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	15.000.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	8.175.600	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan / Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	-	-	-
2	1	0	2	2	000	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	-	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	0%	-	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	0%	-	
2	1	0	2	0	0001	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Baarang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barng Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	-
2	1	0	2	0		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	0%	-	Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi pendapatan daerah	0%	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	-	-	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	-	-
2	1	1	0	2	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya guna untuk meningkatkan disiplin aparatur	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pemulangan Pegawai yang Pensiuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	Pemulangan Pegawai yang Pensiuan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	-
2	1	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	322.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%	233.218.000	
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	8.530.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	13.123.000	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
2	1	0	2	0	000	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	54.865.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	005	Penyediaan Barng Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	35.985.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	-	-
2	1	0	2	0	000	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	20.583.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100.132.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	190.448.000	
2	1	0	2	0	000	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
											Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Disediakan				
2	1	0	2	0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	100.000.000		Pengadaan Mebel	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41	35.530.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	100.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	154.918.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.010.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.713.000.000	
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	2.500.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6	7.000.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	7.903.570.000	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	4	8.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8.930.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang di sediakan (Laporan)	6	2.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	798.000.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	350.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	699.807.157	
2	1	0	2	0	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya pajak dan Perizinannya (Unit)	11	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	533.307.157	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	0	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
2	1	0	2	0	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	166.500.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Konektifitas Darat	10	746.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Konektifitas Darat	10	879.963.500	
							Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap kondisi ideal	55			Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap kondisi ideal	55		
2	1	0	2	0		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	-	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	-	
2	1	0	2	0	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	-	-
2	1	0	2	0	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	75%	200.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik	75%	200.080.000	
2	1	0	2	0	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0	-	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	-	-
2	1	0	2	0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)		100.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	-	-
2	1	0	2	0	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	500	100.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500	200.080.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	0%	-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal	0%	-	
2	1	0	2	0	0002	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun (Unit)	0	-	Pembangunan Gedung Terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	0	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan Pengembangan (Unit)	0	-	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	-	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kec. Pangkalan dan Rimbo data	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	-
2	1	0	2	0		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	30.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	49.920.000	
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	80	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	10	49.920.000	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
											Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-	-
2	1	0	2	0		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	170.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)	95%	250.000.000		
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0	-	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	20.436.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar (Unit)	-	-	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	3000	90.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5000	137.731.900	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0	-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	9	40.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	43.926.100	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	0008	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	47.906.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	-	-
2	1	0	2	0	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	-	-
2	1	0	2	0	0006	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	100.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	100%	184.642.000	
2	1	0	2	0	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	12	30.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	32.224.000	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Kabupaten/Kota					
2	1	0	2	0	000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Farum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	0	-	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	-	-
2	1	0	2	0	001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota (Laporan)	1	70.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	152.418.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	50.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	77.860.000	
2	1	0	2	0	000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6	60.581.500	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0	000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0	-	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12	17.278.500	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	8	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	120.000.000	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	100%	72.140.000	
2	1	0	2	0	000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	-	-	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	-	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	-	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	-	-
2	1	0	2	0	000	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota (Laporan)	2	20.000.000	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	1	41.950.000	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
											kendaraan bermotor kabupaten/kota		Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
2	1	0	2	0	000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	3	50.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2	30.190.000	Tidak Sesuai
2	1	0	2	0	000	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Uji Petik terhadap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	4	50.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Uji Petik terhadap unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor	-	-	Tidak Sesuai

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	0		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	0%	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	0%	-	
2	1	0	2	0	0001	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (Unit)	-	-	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan /atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	-	-
2	1	0	2	0	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	1		Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	50.000.000	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	0%	-	
2	1	0	2	1	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dokumen)	2	50.000.000	Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan-kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	Tidak Sesuai
2	1	0	2	1	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	-	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	1		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	16.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	
2	1	0	2	1	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	-	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-	-
2	1	0	2	1	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	16.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-	Tidak Sesuai
2	1	0	2	1		Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	0%	-	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	0%	-	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	1	000	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-
2	1	0	2	1	000	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rancangan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan dan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	-	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rancangan umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-
2	1	0	2	1		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	10.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	45.321.500	

Kode						Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	0	2	1	000	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Laporan)		-	Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	-	-
2	1	0	2	1	000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota (Laporan)	1	10.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	45.321.500	Tidak Sesuai

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran pimpinan daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang.

Pada tahun 2026 dikarenakan keterbatasan Pagu Indikatif maka tidak adanya program maupun kegiatan dari pokok pikiran dan aspirasi masyarakat.

Tabel II. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan dan sasaran, prioritas serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, bahwasanya Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam RPJMD 2025-2029 terdapat misi pembangunan antara lain yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” serta “Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan”, Program prioritas daerah yang harus dicapai Dinas Perhubungan yaitu Program Prioritas Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah serta Program Prioritas Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota didasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada pencapaian visi misi Lima Puluh Kota yaitu dengan visi :

“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan
Berkelanjutan”

Keterkaitan misi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Misi 4 yaitu “*Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.* Maka, berdasarkan misi Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Perhubungan adalah sesuai penjabaran Visi dan Misi dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mewujudkan Layanan Transportasi yang nyaman, aman dan Terjangkau

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Berdasarkan penjelasan diatas

maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2025-2029 dan indikator kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Sasaran Pertama adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi Darat dengan indikator sasaran yaitu:
 - ✓ Konektivitas Darat dan
 - ✓ Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
- b. Sasaran Kedua adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan dengan indikator sasaran yaitu:
 - ✓ Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Berikut disajikan Ringkasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan pada Tahun 2025-2029 pada Tabel III.1 di halaman selanjutnya :

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan	Mewujudkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Rasio Konektivitas	49	50	51	52	53	54	Rumus : (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
				Konektivitas Darat	10	11	12	13	14	15	Rumus : (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek)/ jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah terpasang Terhadap Kondisi Ideal	55%	53%	50%	48%	45%	43%	Jumlah kelengkapan jalan yang telah Terpasang / jumlah Kelengkapan Jalan yang seharusnya tersedia x 100 %
2	Sasaran RPJMD : Membangun Infrastruktur Strategis.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	79,60	76,60	76,61	76,65	77,0	77,10	

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan program dan kegiatan Dinas Perhubungan untuk Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 dan Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang RKPD 2026.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Perhubungan erat kaitanya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan”.

Dari penelaahan terhadap faktor –faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dihasilkanlah 1(satu) Program Dinas Perhubungan yaitu:

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Ringkasan program dan kegiatan Dinas Perhubungan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel III.2 berikut:

Tabel III. 2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan
Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyediaan perlengkapan di jalan Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
		Kabupaten/Kota	2. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 2. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
		6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
		7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada Rencana Kerja Dinas Perhubungan terdapat 2 Kegiatan , dan 2 Sub Kegiatan yang tidak Sesuai Ranwal RKPD. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut yaitu:

1. Kegiatan Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu); dengan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 2 program, 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Pada program Penunjang Urusan

- Pemerintahan Daerah terdapat 5 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan yaitu:
- a. Administrasi Keuangan, dengan 3 Sub Kegiatan
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 6 Sub Kegiatan
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 Sub Kegiatan
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 Sub Kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan program dan kegiatan urusan di bidang perhubungan. Pada program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yaitu:
- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan 1 Sub Kegiatan
 - b. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan 1 Sub Kegiatan
 - c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan 4 Sub Kegiatan
 - d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota, dengan 2 Sub Kegiatan
 - e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan 2 Sub Kegiatan
 - f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, dengan 2 Sub Kegiatan
 - g. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 Sub Kegiatan.

Sebagai PD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Dinas Perhubungan secara langsung melaksanakan sub kegiatan yang termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Program prioritas daerah yang harus dicapai Dinas Perhubungan yaitu *Program Prioritas 2 dan Program Prioritas 6*. Dengan demikian, Dinas Perhubungan memiliki daftar Sub Kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel III.3 Tabel Pendukung Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan Daerah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	PPD 6: Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel III.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendukung Prioritas Kabupaten yang ada di Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan Daerah yang terdiri dari satu (1) Program, satu (1) Kegiatan dan satu (1) Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 49.920.000. Kegiatan ini meliputi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (Kios).
2. PPD 6 : Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari satu (1) Program, satu (1) Kegiatan dan satu (1) Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 152.418.000

Adapun mengenai uraian Sub Kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel III.4 pada halaman selanjutnya

Tabel III.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	LOKASI	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERHUBUNGAN				16.527.683.989				22.723.997.163
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.527.683.989				22.723.997.163
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				16.527.683.989				22.723.997.163
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah		100	15.647.720.989			100,00	19.155.433.821
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5.811.247.832	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	7.035.000.000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0 %	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	233.218.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	300.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	LOKASI	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	190.448.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	690.000.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8.713.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	10.097.000.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	699.807.157	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 %	1.033.433.821
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		11 53	879.963.000				3.568.563.342
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	95%	509.308.342
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan yang berfungsi dengan baik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	200.080.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	75%	750.000.000
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	49.920.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	95%	100.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	LOKASI	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Fasilitas Parkir							
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Laik Jalan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95%	250.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	95%	490.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	184.642.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub , PUG, dan Program Priotitas (Penataan infrastruktur strategis dan terpadu)	100%	781.297.000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	77.859.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	100%	253.623.000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	72.140.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	100%	306.380.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0%	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	95%	63.522.000
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0%	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	95%	133.470.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	LOKASI	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)							
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 %	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	95%	138.889.000
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kot	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	45.321.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mendukung IKU Dishub	100 %	42.074.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 dikelompokkan dalam 1 Urusan, yaitu Urusan Perhubungan dengan 2 Program, 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada tabel IV.1:

Tabel IV.1 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026

No	Bidang Urusan	Tahun 2026			Total Pagu (Rp)	Tahun 2027			Total Pagu (Rp)	Ket
		Jumlah				Jumlah				
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perhubungan	2	12	30	16.527.684.489	2	16	39	22.723.997.163	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun mengenai uraian program dan kegiatan Dinas Perhubungan, target kinerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 secara lengkap dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 pada Tabel IV.2 (Cetak Sipd):

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERHUBUNGAN						16.527.683.989,00								22.723.997.163,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.527.683.989,00								22.723.997.163,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						16.527.683.989,00								22.723.997.163,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.647.720.989,00						-		19.155.433.821,00	
		[Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	15.647.720.989,00	-	-	-	-	-	-	19.155.433.821,00	-	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	5.811.247.832,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	7.035.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	5.788.072.232,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	8.175.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			0 %	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	233.218.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	8.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	13.123.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	54.865.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	35.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	20.583.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	100.132.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	190.448.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	690.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		161.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				94 Unit	35.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	154.918.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		279.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	8.713.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	10.097.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	7.903.570.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				7 Laporan	798.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		1.584.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	699.807.157,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	1.033.433.821,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				19 Unit	533.307.157,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		533.433.821,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	166.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						879.963.000,00						-	3.568.563.342,00	
		[Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat]	Konektivitas Darat	15	55.59	10	11	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	43	70	55	53									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	509.308.342,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		509.308.342,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Sarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan yang berfungsi dengan baik</i>	-			75 %	200.080.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				500 Unit	200.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	-			100 %	49.920.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				8 Dokumen	49.920.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Laik Jalan</i>	-			95 %	250.000.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	490.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				2 Orang	20.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				5000 Dokumen	137.731.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				9 Unit	43.926.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				12 Laporan	47.906.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	184.642.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	781.297.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	32.224.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				1 Laporan	152.418.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		661.297.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	77.859.500,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	253.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>				6 Laporan	60.581.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		129.438.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>				12 Laporan	17.278.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		124.185.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana</i>	-			100 %	72.140.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	306.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				8 Laporan	41.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		110.430.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				2 Laporan	30.190.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		115.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	63.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		63.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	133.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		133.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	138.889.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		138.889.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kot</i>	-			100 %	45.321.500,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	42.074.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	45.321.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		42.074.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H								16.527.683.989,00							22.723.997.163,00	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perhubungan juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut

merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja Dinas Perhubungan memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Dinas Perhubungan. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



S A F N I